

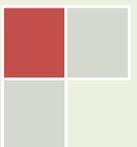


PROFIL GENDER TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : JL. PEMUDA NO. 2 SUNGAILIAT



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Landasan hukum yang menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dalam UUD 1945 Pasal 27. Segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C. Tujuan utama dari berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional ini adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk didalamnya adalah tentang kesetaraan gender. Misalnya, meningkatnya akses dan partisipasi di bidang pendidikan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan penegakkan HAM, serta praktik demokrasi yang sehat hingga di kalangan grassroot. Kondisi demikian ini akan menciptakan stabilitas sosial dan politik, sehingga berdampak pada stabilisasi berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya gambaran tolok ukur keberhasilan pembangunan di atas masih jauh dari harapan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut, didefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini setiap lembaga dan satuan kerja perangkat daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang responsif gender.

Inpres No. 9/2000 diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. PERMENDAGRI ini sebagai landasan operasional pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Bangka.

Dalam konteks ini, setiap satuan kerja (Satker) diwajibkan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga PUG menjadi ruh dalam pembangunan di segala bidang. Untuk melihat hasil pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, maka perlu menganalisis terlebih dahulu melalui data kuantitatif dan kualitatif tentang kesenjangan gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat dilakukan reformulasi kebijakan responsif gender melalui perencanaan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender adalah pembangunan yang mengintegrasikan secara riil tentang pengalaman, aspirasi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Isu-isu strategis kesenjangan gender di Kabupaten Bangka masih memprihatinkan. Seputar permasalahan Hukum dan HAM masih tingginya kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama, meningkatnya jumlah perempuan korban kriminalitas, tingginya jumlah kasus KDRT. Bidang Pendidikan masih menunjukkan rendahnya angka partisipasi sekolah perempuan pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, disamping itu juga terlihat tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka. Bidang Kesehatan menunjukkan rendahnya kesadaran Ibu untuk memberikan ASI pada Anak, rendahnya kesadaran orang tua untuk mengimunisasikan bayi mereka, lebih dari itu angka kematian ibu juga relatif masih tinggi. Di bidang Politik keterlibatan perempuan dalam parlemen masih butuh peningkatan pada tahun 2019 terutama pemenuhan kuota perempuan, disamping itu keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif juga sangat rendah berdasarkan capaian kinerja atau kepangkatan. Bidang sosial menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang belum tertangani dengan baik, disamping juga minimnya sarana pendidikan khusus bagi para defabel juga menjadi masalah tersendiri. Bidang ketenagakerjaan masih meninggalkan catatan dimana sektor formal masih didominasi oleh laki-laki, meskipun pada angkatan kerja antar Negara perempuan lebih banyak

dibanding laki-laki namun mayoritas perempuan masih bekerja di bidang informal baik sebagai pembantu maupun pekerja lepas.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa hasil pembangunan sumberdaya manusia yang dilaksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki, baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini masih terdapat kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki (tepatnya kesenjangan gender), baik dalam akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan, sosial budaya dan politik, dan pengambil keputusan, perlindungan anak dan berbagai aspek lainnya. Dalam bidang pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih banyak diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan.

Penyusunan profil Gender merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi gender disuatu wilayah Kabupaten/Kota. Adanya nilai-nilai budaya patriarki dimasyarakat yang masih kuat. Telah menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan. Selain itu adanya pemahaman yang sempit dari penjabaran makna nilai dalam agama, serta nilai-nilai budaya lainnya yang cenderung bias gender. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tradisi lisan seperti norma atau etika yang berlaku, mempertajam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya. Profil Kabupaten Bangka akan sangat berguna dalam merencanakan berbagai kebijakan pembangunan. Meskipun diketahui bahwa data statistik yang ada telah menunjukkan beberapa data gender atau data terpilah, namun masih sangat terbatas pada data tertentu saja.

Buku Profil Gender akan memuat informasi tentang kondisi laki-laki dan perempuan yang berada disemua lembaga baik lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang responsif gender.

I.I. TUJUAN

- Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, berupa data jumlah dan kondisi laki-laki dan perempuan.
- Tersedianya informasi gender, yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program yang ada.
- Menjadi pendorong bagi lembaga pemerintah dalam hal penyusunan data yang lebih responsif gender, yaitu menyiapkan data-data yang dipilah antar laki-laki dan perempuan.

1.2. Output (Luaran)

- Informasi statistik gender pada aspek pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, publik dan lainnya.
- Buku profil Gender Kabupaten Bangka Tahun 2019

1.3. Outcome (Dampak)

Buku Profil Gender akan berdampak pada :

- Proses munculnya kesadaran bagi semua pihak khususnya bagi penyusunan kebijakan dalam merencanakan kegiatan dengan memperhatikan aspek kebutuhan laki-laki dan perempuan
- Program akan lebih efektif baik dari aspek waktu dan biaya
- Capaian tujuan lebih tajam dan berkesinambungan.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep Gender

Gender menjadi isu penting dan istilah yang sering diperbincangkan dalam proses pembangunan manusia baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Namun dari pengamatan, masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki.

Kesalahpahaman tentang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahaminya secara utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep gender dalam memahami sistem ketidakadilan sosial dan hubungannya dengan ketidakadilan lainnya. Oleh karena itu untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks. Istilah gender dan sex seringkali digunakan secara bergantian meskipun pada dasarnya makna keduanya berbeda.

2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

Sejak ditetapkan dan dikeluarkannya Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia dan diberlakukannya instruksi presiden tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal, sehingga perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG. Sehingga dalam implementasinya InPres tersebut didukung dan dikawal oleh berbagai produk kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat lebih detail dan teknis dalam rangka pencapaian yang maksimal.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga mengatur pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur dalam Permendagri RI Nomor 67 Tahun 2011. PUG dalam peraturan tersebut pada intinya dimaksudkan dalam beberapa gagasan dan kepentingan sebagai berikut:

1. PUG dimaksudkan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kesetaraan gender, keadilan gender, analisis gender, perencanaan responsif gender, bahkan anggaran responsif gender. Dalam strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam segala bentuk level kebijakan.
2. PUG secara keseluruhan diinstruksikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan hingga pemerintah desa, untuk melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan.
3. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, renstra SKPD, dll.

2.3. Lokasi Penyusunan Profil

Buku profil gender akan mengambil data di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu dari 7 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Buku Profil Gender di susun dengan mengakumulasi data-data gender yang berasal dari lembaga pemerintah baik dari departemen maupun non departemen, dinas maupun lembaga yang memiliki data terkait dengan analisis gender. Adapun bentuk data yang diakses adalah data sekunder, dan juga primer yang diperoleh melalui wawancara untuk memperjelas informasi yang di anggap perlu . Selain itu dilaksanakan juga Sosialisasi rencana penyusunan Profil Gender yang dilanjutkan dengan meminta

masukannya dari semua instansi yang terkait demi perbaikan data yang akan dibukukan.

2.5. Sumber Data

Sumber data pada Buku Profil Gender Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- Data primer : data yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah , Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A.
- Data sekunder : data/informasi yang diperoleh melalui wawancara pada sejumlah pejabat instansi kabupaten bangka untuk melengkapi kekurangan data primer dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, lengkap dan spesifik tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender di Kabupaten Bangka.

2.6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan Buku Profil Gender. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang mengacu pada analisis gender dengan lebih menonjolkan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan.

2.7. Model Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

- Model PROBA (problem based approach) Model analisa gender ini adalah suatu teknik untuk menganalisa kesenjangan gender (gender gap). Dengan demikian analisa gender dimulai dengan melihat kesenjangan gender yang selanjutnya dibentuk GFP (gender focal point) dan POKJA PUG dalam tataran pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender. Model analisa ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator seperti input, output, outcome dan proses.
- Model analisa GAP (gender analysis pathway) Model atau kerangka analisa gender GAP merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/program/ proyek dari kegiatan pembangunan.

2.8. Beberapa Pengertian Dasar

Untuk lebih memahami tujuan penyusunan Profil Statistik dan Indikator Gender , maka ada beberapa pengertian dasar yang perlu diketahui yaitu:

- ❖ Feminim adalah ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki kaum perempuan
- ❖ Maskulin adalah ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki kaum laki-laki
- ❖ Patriarki adalah system yang menganut garis laki-laki (ayah) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- ❖ Matriarki adalah system yang menganut garis perempuan (ibu) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- ❖ Sex adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian reproduksi.
- ❖ Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
- ❖ Bias Gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan
- ❖ Stereotipe adalah citra buku yang melekat pada peran, fungsi dan tanggung jawab yang laki-laki membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
- ❖ Relasi Gender adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerjasama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain.
- ❖ Analisis Gender adalah proses menganalisis data informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- ❖ Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil (Equaity) dan setara (Equality) dalam hubungan kerjasama laki-laki dan perempuan.
- ❖ Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,

dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan valuasi.

- ❖ Peran Domestik adalah peran budaya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- ❖ Peran produktif adalah peran budaya yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan produksi atau uang.
- ❖ Peran Publik adalah peran yang terkait dengan masalah social budaya dan kegiatan agama pada masyarakat.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Letak dan Geografis

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang Km^2 atau 302.879,47 Ha atau 3.028,794 Km^2 . Dengan luas daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh 3.021 Km^2 atau 302.100 ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka beriklim Tropis Type A dengan variasi curah hujan antara 0,8 hingga 311 mm tiap bulan. Suhu udara rata-rata Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi pangkalpinang menunjukkan variasi antara $25,7^{\circ}\text{C}$ hingga $28,2^{\circ}\text{C}$ dengan temperatur udara tertinggi $32,7^{\circ}\text{C}$. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 70 hingga 86 persen sementara intensitas penyinaran matahari berkisar antara 21,9 % pada bulan januari sampai 85,3 % pada bulan September dan tekanan udara rata-rata berkisaran antara 1009,7 hingga 1012, 1 mb. Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai – sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut yang disebut kolong .

Secarageografis terletak antara 10 20 LU 30 LS dan 105° - 107° Bt. Memiliki luasdaratan 11.524,14 Km^2 . Berada pada jalur internasional yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berdirinya kawasan industri maritim. Bangka dibatasi oleh laut dan selat sebagai berikut .

Tabel 3.1. Batas Wilayah Kabupaten Bangka

Batas	Laut dan Selat
Di sebelah Utara	Laut Natuna
Di sebelah Selatan	Laut Jawa
Di sebelah Barat	Selat nangka
Di sebelah Timur	Selat Gaspar

Jarak yang paling jauh dari ibu kota Kabupaten Bangka ke Ibukota Kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Mentok (Kabupaten Bangka Barat).

Tabel 3.2. Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) Ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)

No	Dari Sungailiat ke Ibukota Kabupaten / Kota di Pulau Bangka	Jarak (Km)
1	Toboali	158
2	Mentok	140
3	Koba	90
4	Pangkalpinang	33

Sumber: Bappeda Bangka

Jumlah Kecamatan Ada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bangka, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungailiat Ibukota Kecamatan Sungailiat
2. Kecamatan Pemali Ibukota Kecamatan Pemali
3. Kecamatan Merawang Ibukota Kecamatan Baturusa
4. Kecamatan Mendo Barat Ibukota Kecamatan Petaling
5. Kecamatan Puding Besar Ibukota Kecamatan Puding Besar
6. Kecamatan Bakam Ibukota Kecamatan Bakam
7. Kecamatan Riau silip Ibukota Kecamatan Riau silip
8. Kecamatan Belinyu Ibukota Kecamatan Belinyu

3.2. Gambaran Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka 11.524,14 Km² yang tersebar di 8 Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mendo Barat, Riau silip dan Belinyu. Kecamatan Mendo Barat ibukota Kabupaten yang luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel. 3.

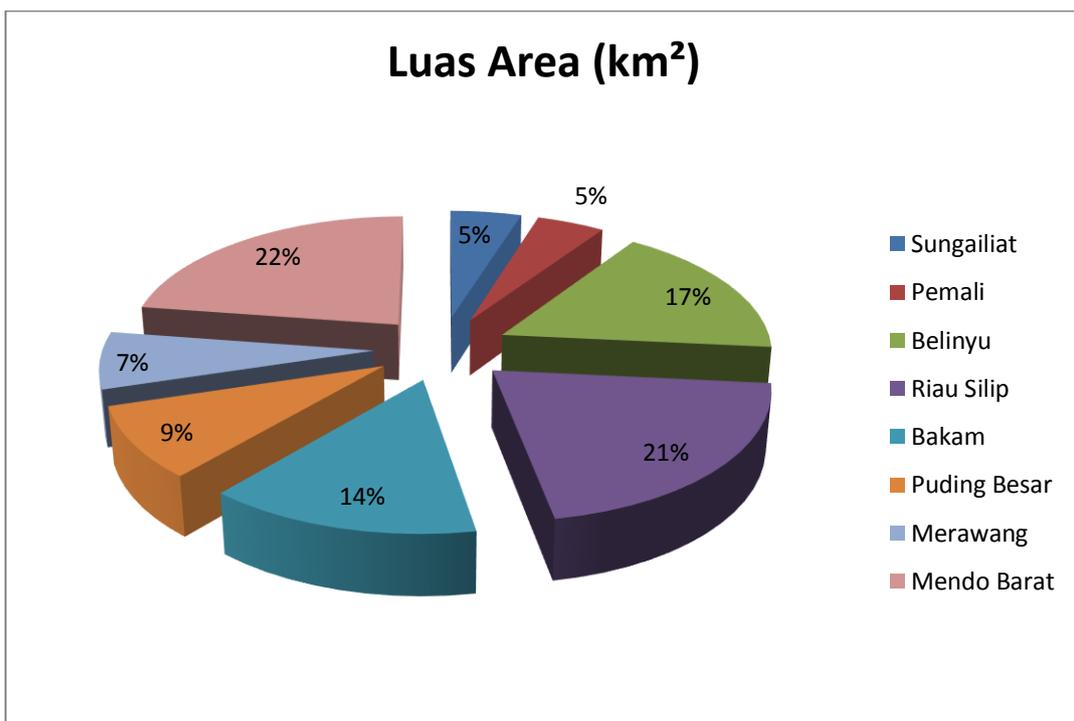
Luasnya suatu wilayah dan ketersediaan SDA akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat karena akan menjadi wilayah yang diminati untuk kegiatan ekonomi. Karena itu luas wilayah sangat potensi dalam mempercepat perkembangan. Bila luas wilayah didukung oleh keragaman sumberdaya alam (hayati), seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan, maka proses pembangunan akan menyentuh relasi gender. Kehidupan sosial dan ekonomi sangat tergantung pada tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Tabel 3.3. Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	Kecamatan (1)	Uraian	
		Luas Area (km ²) (2)	Luas Area (%) (3)
1.	Sungailiat	146,63	5,64
2.	Pemali	140,06	4,85
3.	Belinyu	514,60	17,04
4.	Riau Silip	624,11	20,66
5.	Bakam	425,04	14,07
6.	Puding Besar	271,32	8,98
7.	Merawang	215,26	7,13
8.	Mendo Barat	683,67	22,63
	Jumlah	3020,69	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2018

Grafik 1
Luas Area dan Presentase Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019



Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan
Tahun 2019

Golongan	a	B	c	d	Jumlah (Orang)
I	-	-	-	-	0
II	0	2	1	1	4
III	2	4	8	8	22
IV	3	2	-	-	5
<i>Jumlah Total</i>					31

Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	21
2	Jabatan Fungsional	0
3	Tenaga Teknis Lainnya	0
4	Arsiparis	0
5	Staf Administrasi/Fungsional Umum	11
<i>Jumlah Total</i>		32

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	3
3	S1/DIV	19
4	D III	1
5	D I	-
6	SLTA	8
7	SLTP	-
8	SD	-
<i>Jumlah Total</i>		31

Untuk Pegawai yang berasal dari tenaga kontrak / honorer berjumlah 35 (Sembilan) orang yakni :

- a. Petugas Administrasi Pemerintahan : 27 (Dua Puluh Tujuh)orang;

- b. Sopir : 4 (empat) orang;
- c. Petugas Kebersihan : 2 (dua) orang;
- d. Penjaga malam : 2 (dua) orang;

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset tanah dan bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yakni :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.704M² yang merupakan tanah bangunan gedung terdiri dari :

- Tanah bangunan gedung kantor (eks. BKKBN) seluas 1.704 M², terletak di Jalan Pemuda No. 2 Sungailiat.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari satu unit dengan luas lantai 288 M², Musholla satu unit dengan luas 43,90 M², Gudang Obat satu unit dengan luas 57 M² , Rumah Dinas satu unit dengan luas 81 M².

Disamping bangunan gedung kantor, sampai dengan tahun 2016 Dinas DP2KBP3A memiliki 5 (lima) unit Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dengan luas masing 50 M², yaitu :

- a. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungailiat;
- b. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pemali;
- c. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mendo Barat;
- d. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Puding Besar;
- e. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Riau Silip;
- f. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Belinyu;
- g. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bakam;
- h. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Merawang.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka maupun bantuan dari Pemerintah Pusat.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki dan mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka per 31 Juli 2018 sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang terdiri dari :

- 2 (dua) unit minibus Toyota Avanza ,
- 1 (satu) unit Mobil Unit Penerangan (Mupen),
- 1 (satu) unit Mobil Bus Pelayanan KB (Muyan),
- 1 (satu) unit Mobil Bus Antar Jemput Akseptor,
- 1 (satu) unit Mobil Unit Pelayanan Keliling (Molin) dan 14 (empat belas) unit Sepeda Motor.

3.3 Sosial Budaya

Kabupaten Bangka dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya bidang Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Industri dan Pertambangan serta perdagangan hal inilah yang mendorong pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat baik dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong(eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Potensi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut antara lain untuk komoditas kakap, kerapu, dan rumput laut. Perairan laut Kabupaten Bangka juga menyimpan potensi non ikan yaitu untuk pengembangan wisata bahari dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan penambangan lepas pantai.

Perkebunan di Kabupaten di bagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produksi komoditas perkebunan rakyat terdiri dari antar lain lada, karet, kelapa dan coklat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh 12 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit. Untuk pembangunan di sektor industri ditingkatkan dan diarahkan agar semakin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi. Di Kabupaten Bangka ada 693 industri, yang terdiri dari industri besar sebanyak 23 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.157 orang, Industri sedang sebanyak 27 perusahaan dengan tenaga kerja 1.463 orang sedangkan industri kecil rumah tangga sebanyak 647 perusahaan dengan

2.924 orang tenaga kerja. Dari aspek agama, Masyarakat Kabupaten Bangka mayoritas Islam dengan komposisi mencapai 85,43%.Selainnya agama Kristen Protestan, Katolik dan Hindu. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai berikut

Tabel 3.7.
Jumlah Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka Tahun 2018

Kecamatan	Agama						
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Lainnya
Sungailiat	70.842	3.946	1.574	23	11.410	3.598	738
Pemali	28.178	859	329	0	2.163	841	232
Belinyu	37.940	1.307	804	6	8.035	715	206
Riau Silip	24.253	472	414	0	1.876	382	131
Bakam	17.696	111	19	0	349	89	22
Puding Besar	19.446	10	1	0	6	0	0
Merawang	24.681	565	403	0	2.285	1.341	393
Mendo Barat	47.810	215	106	0	128	65	37
Jumlah	270.846	7.485	3.650	29	26.252	7.031	1.759
Prsentase	85,43%	2,36%	1,15%	0,01%	8,28%	2,22%	0,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan catatan sipil Tahun 2018

BAB IV
DEMOGRAFI

Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya, karena penduduk merupakan asset yang sangat penting bagi suatu daerah. Jumlah penduduk menjadi ukuran dalam menilai perkembangan pembangunan. Namun disisi lain penduduk dapat pula menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk perlu diarahkan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal.

Dalam dinamika pembangunan diberbagai bidang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, peran dan fungsi penduduk sangat strategis oleh karenanya pembangunan bidang kependudukan selalu mendapat tempat utama. Hal ini disebabkan oleh akhir dari setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan mutu penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Pada bab ini akan dapat menunjukkan kondisi perkembangan laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

4.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Tahun 2018. Jumlah penduduk secara keseluruhan 317.735 jiwa yang terdiri atas 165.529 orang laki-laki dan 152.206 orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 53 %, sedangkan penduduk perempuan 47 %. Pada Tabel 5 menunjukan kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbesar yaitu 72.148 jiwa dan di ikuti oleh kecamatan Belinyu sebesar 50.161 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Puding Besar hanya sebesar 17.996 jiwa . Lebih jelasnya ditampilkan tabel 8 berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019

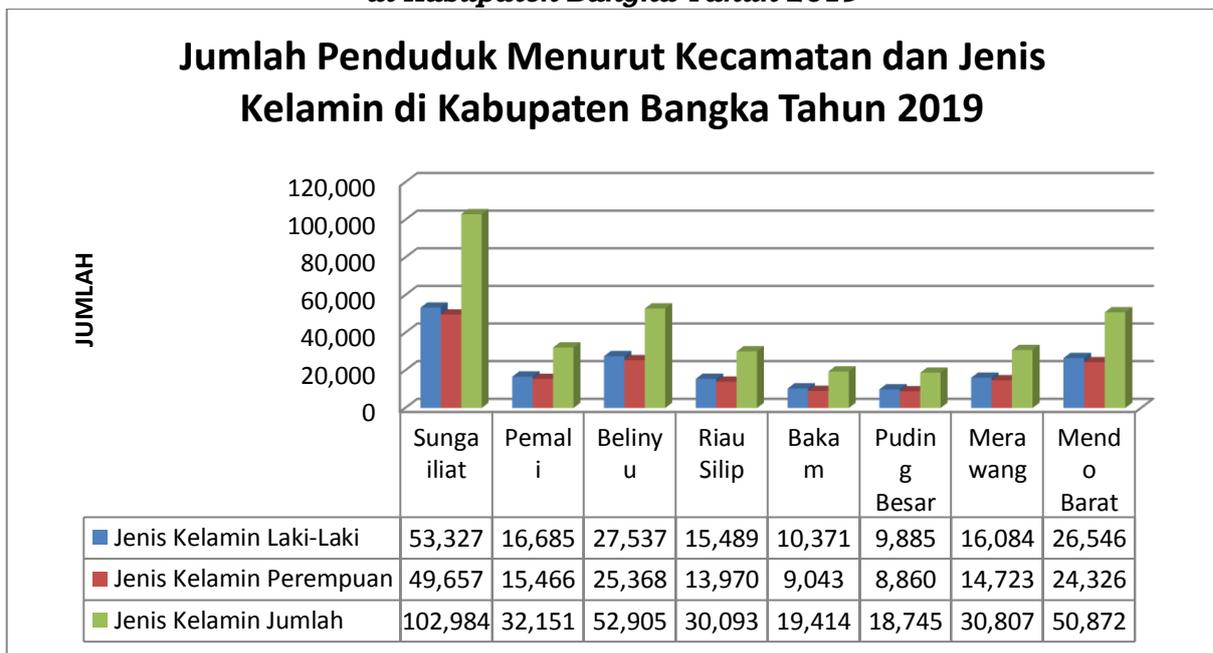
NO	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungailiat	53.327	49.657	102.984
2.	Pemali	16.685	15.466	32.151

3.	Belinyu	27.537	25.368	52.905
4.	Riau Silip	15.489	13.970	30.093
5.	Bakam	10.371	9.043	19.414
6.	Puding Besar	9.885	8.860	18.745
7.	Merawang	16.084	14.723	30.807
8.	Mendo Barat	26.546	24.326	50.872
	Jumlah	175.924	161.413	337.337

Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2019

Pada Tabel 8 menunjukkan dari 8 Kecamatan terdapat 337.337 penduduk persentase jumlah penduduk perempuan tidak terlalu berbeda yaitu 161.413 jiwa atau 47,85% laki-laki dan perempuan 175.924 jiwa atau 52,15%. Lebih jelasnya dapat di lihat pada diagram di bawah ini.

Grafik 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019



4.2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penduduk adalah asset pembangunan, dengan demikian komposisi umur akan menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang produktif. Komposisi umur penduduk biasanya dinyatakan dalam kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif dikaitkan dengan aktivitas dalam bekerja. Sehingga penduduk yang dinyatakan berusia produktif apabila memasuki masa usia kerja. Untuk di Kabupaten Bangka usia produktif disesuaikan dengan standar nasional yaitu wajib belajar 15 Tahun. Penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Kelompok umur dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Kelompok Umur (Thn)	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
0-4	16.186	15.484	31.670
5-9	15.558	14.640	30.198
10-14	15.135	14.450	29.585
15-19	14.730	14.066	28.796
20-24	15.654	13.995	29.649
25-29	15.279	13.471	28.750
30-34	14.813	13.306	28.119
35-39	14.004	11.883	25.887
40-44	12.284	10.465	22.749
45-49	9.843	8.887	18.730
50-54	8.240	7.701	15.941
55-59	6.960	6.116	13.076
60-64	4.379	3.927	8.306
65-69	2.429	2.473	4.902
70-74	1.624	1.773	3.397
75+	1.873	2.677	4.550
Jumlah	168.991	155.314	324.305

Sumber : BPS Kabupaten Bangka dalam angka Tahun 2018.

Dari Tabel 9 nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berada pada kelompok umur dewasa 220.003 jiwa atau 67,84 % (kisaran 15 – 64 Tahun). Selanjutnya terdapat kelompok umur lanjut (65 tahun keatas) sebesar12.849 jiwa atau 3,96 %. Dengan demikian dapat dikatakan komposisi penduduk Kabupaten Bangka sangat mendukung proses percepatan pembangunan.

Data terpilah dari komposisi umur penduduk berdasarkan Gender sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program yang responsif gender. Karena dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan umur akan memudahkan mencapai tujuan. Seperti upaya peningkatan peran perempuan disuatu wilayah. Akan lebih jelas disusun dengan mengacu pada data jumlah dan komposisi umur terbesar.Selain itu program dapat direncanakan sesuai kebutuhan perempuan dengan kondisi karakteristik umur tersebut. Data komposisi penduduk yang di pilah berdasarkan kelompok umur dan gender akan bermanfaat untuk di prediksi seperti aspek kesejahteraan.Dengan banyaknya penduduk usia produktif, semakin banyak penduduk usia produktif maka dinamika pembangunan daerah yang mendorong karena meningkatnya berbagai kegiatan masyarakat.

Penduduk usia non produktif yaitu usia 65 Tahun ke atas terdapat 3,96%. Persentase ini menunjukkan cukup besar jumlah penduduk usia

lanjut. Yang menggambarkan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Bangka.

BAB V

PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

Berdasarkan Buku Statistik Gender di beberapa Kabupaten diketahui bahwa kesepakatan yang mengarahkan pendidikan yang berkeadilan gender dengan program yang mengarahkan pendidikan yang berkeadilan gender. Penjelasan berkaitan dengan bidang pendidikan, akan menjelaskan kondisi sarana pendidikan serta mengenai jumlah sarana sekolah, jumlah penduduk yang buta huruf, tingkat partisipasi sekolah (TPS), dan pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan

mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

5.1. Sarana dan Prasarana Sekolah

Pendidikan yang merata dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang besar dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat terlebih lagi dari masyarakat, hal yang paling utama adalah tersedianya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah. Pada tabel 7 ditunjukkan jumlah sarana sekolah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Jumlah Sarana Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Sekolah	Jumlah	Guru		Murid	
		L	P	L	P
Sekolah Negeri					
TK	18	0	71	324	311
SD	166	541	1.201	17.435	15.854
SMP	31	183	378	5.216	5.422
Swasta					
TK	52	0	0	1.988	1.879
SD	14	43	101	1.625	1.399
SMP	13	72	82	1.587	1.132
Jumlah	294	839	1.833	28.175	25.997

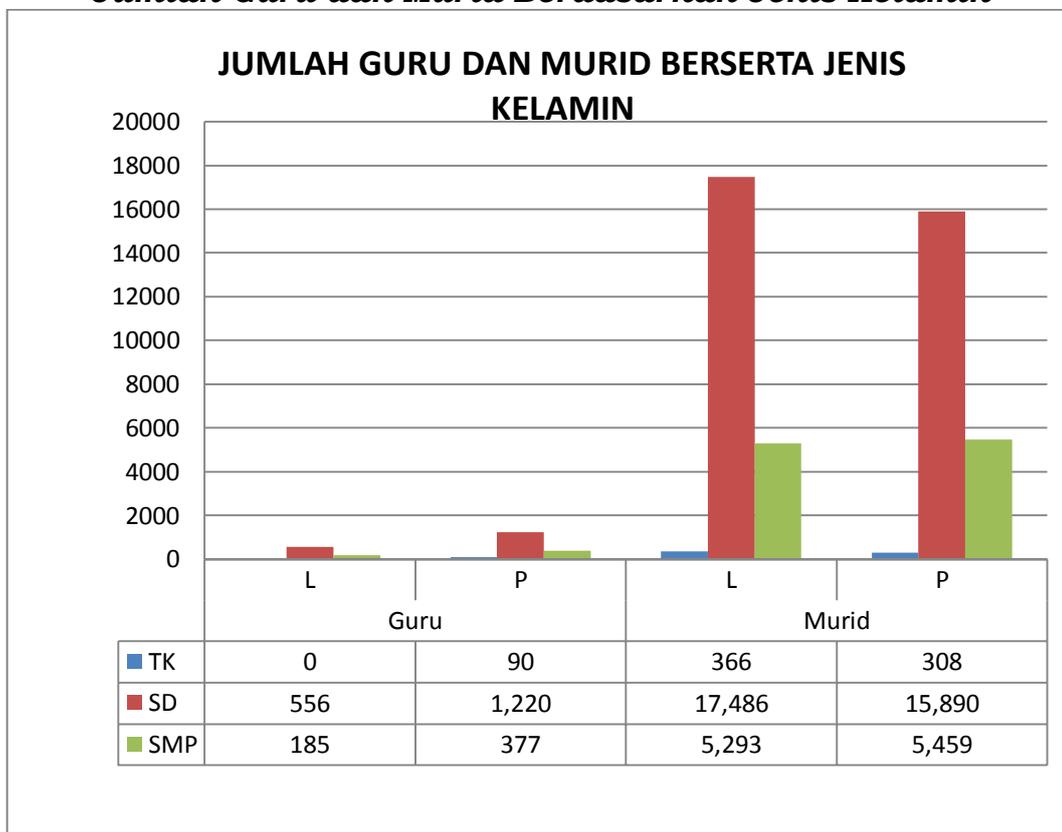
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2018

Pada Tabel 5.1 nampak jumlah sarana terbesar pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 166 buah, kemudian SLTP sebesar 31 buah. Besarnya jumlah sarana pendidikan pada tingkat dasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Bangka. Karena diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas jumlah penduduk salah satu indikatornya adalah meningkatkan lama pendidikan anak. Berdasarkan temuan diketahui bahwa tumbuh kembang kemampuan IQ seseorang anak dimulai pada usia dini (sampai 5 tahun) kemudian tahap usia sampai 9 tahun. Selebihnya peningkatan IQ hanya sekitar 20% lagi. Dengan demikian ketersediaan pendidikan pada SD dan SLTP sederajat sangatlah menunjang upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Bangka. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Suasana belajar mengajar akan

terasa lebih hidup, dan minat mencari ilmu pengetahuan bagi murid-murid akan tinggi. Perkembangan IPTEK dalam bidang pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan manusia-manusia yang bergelut didalamnya.

Pada Tabel nampak bahwa untuk sekolah TK tidak ada guru laki-laki. Data ini merupakan gambaran yang paling nyata dari efek adanya peranan gender di masyarakat. Laki-laki dinilai tidak memiliki “sensitifitas” dalam mendidik anak kecil (TK), Karena asumsi yang mengurus anak adalah perempuan. Padahal secara biologis laki-laki dan perempuan memegang berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan peran gender baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Kondisi ini juga tergambar dari akumulasi rata-rata guru perempuan yaitu 68,60 % dan laki-laki 31,40 %. Besarnya perbedaan persentasi gender pada guru juga adalah gambaran bahwa pada tingkat dasar perempuan dianggap lebih “cocok” . Hal ini Nampak dari angka jumlah guru perempuan (68,60 %) jauh lebih besar dari guru laki-laki yang hanya (31,40%). Lebih jelasnya sarana sekolah menurut jenjang pendidikan dapat pada diagram 5 berikut :

Grafik 3
Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenis Kelamin



5.2. Angka Buta Huruf

Pemerinta telah mengagendakan masalah penanganan buta huruf sebagai salah satu kebijakan yang penting. Hal ini disadari memiliki kaitan

dengan peningkatan kualitas SDM sesuai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Angka melek huruf menjadi data yang sangat diperlukan untuk kepentingan menilai kualitas manusia disuatu wilayah. Namun dalam kenyataannya sampai perlu mendapat perhatian. Pada Tabel 8 berikut disajikan data mengenai jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sekitar 0,41 % dari total jumlah penduduk penduduk usia 15 tahun ketas yang tidak bias baca tulis. Adapun laki-laki sebanyak 0,30%. Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel 8 Berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bangka Tahun 2019

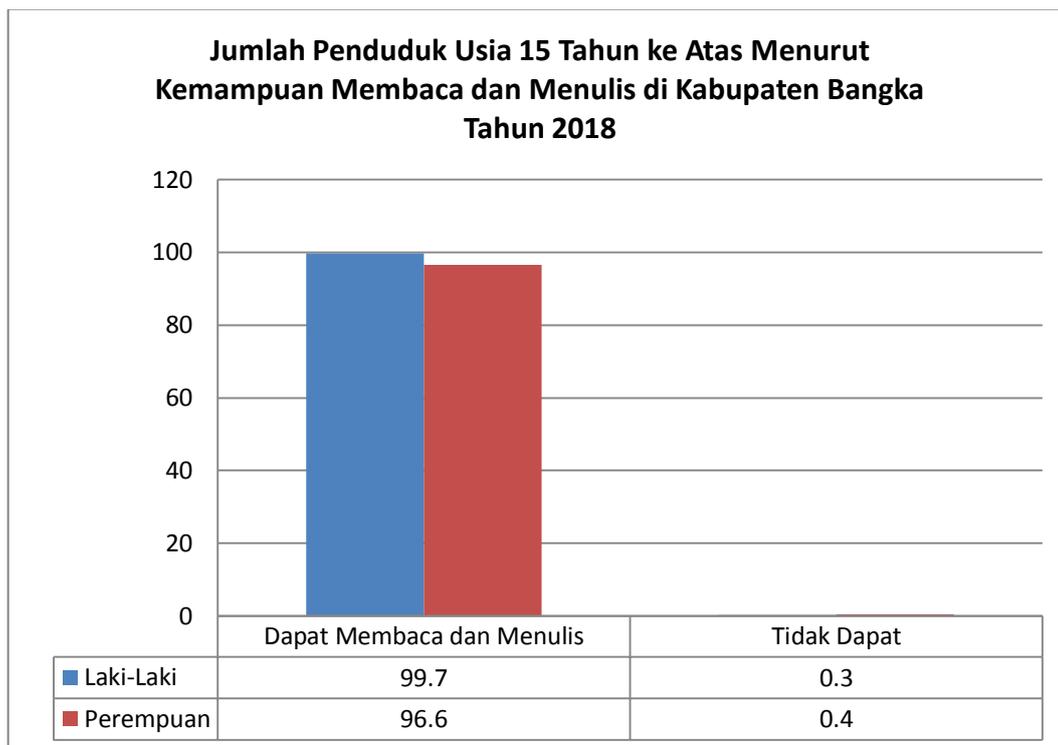
Kemampuan Membaca	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	
Dapat Membaca dan Menulis	99.70%	99.59%	99.60%
Tidak Dapat	0.30%	0.41%	0.40%
Jumlah	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2018

Pada Tabel Nampak bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sebesar 0,41% lebih besar dari laki-laki yaitu 0,30 %. Sebaliknya jumlah perempuan yang bisa baca tulis lebih kecil dari laki-laki yaitu 99,59 %.

Gambaran data gender ini bahwa baik laki-laki maupun perempuan perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kemampuan baca tulisnya .Meskipun data yang ditampilkan tidak menjelaskan tentang kemampuan baca tulis ini apakah aksara Indonesia atau daerah. Mengingat masih banyak masyarakat dipedesaan yang tidak bisa baca tulis, tetapi mampu membaca tulisan bahasa daerah dan juga bahasa arab. Karena itu data ini perlu di kaji lebih dalam lagi untuk mengetahui ketidak mampuan ini, termasuk menemukan penyebab adanya kesenjangan perbandingantersebut. Pada diagram ditunjukan kemampuan membaca / menulis berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Grafik 4
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bangka Tahun 2019



5.3. Tingkat partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah adalah gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah pada tingkat usia tertentu dengan jumlah seluruh anak pada tingkat umur tersebut. Tingkat partisipasi sekolah sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar serta keinginan masyarakat untuk aktif dalam sekolah. Data tentang tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Bangkatersaji pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Tahun 2019

Uraian	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi
Laki-laki			
7-12 Tahun	0	110,61	0
13-15 Tahun	0	107,6	0
Perempuan			
7-12 Tahun	0	107,6	0
13-15 Tahun	0	100,9	0
Laki-laki+Perempuan			
7-12 Tahun	0	104.8	0
13-15 Tahun	0	93.8	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5.3 yang bersumber dari Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2017 di ketahui bahwa angka partisipasi sekolah (APS) laki-laki lebih tinggi dari Perempuan yaitu 218,21 % dan 208,5 Data ini menunjukkan bahwa cukup tinggi partisipasi gender pada pendidikan di Kabupaten Bangka.

5.4. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Besarnya angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai salah satu indikator ukuran keberhasilan pendidikan serta lamanya pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkatan pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusia secara umum akan semakin tinggi, ini akan berdampak pula pada segi ekonominya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kondisi ekonomi masyarakat akan semakin baik. Untuk mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 5.4. Pada Tabel 5.4 nampak bahwa penduduk di Kabupaten Bangka yang menamatkan sampai jenjang SI sederajat terdiri dari perempuan 2.26 % dan laki-laki 2.05 % . Selanjutnya pada pendidikan dasar SD Nampak perempuan sedikit lebih banyak di banding laki-laki 14.14 %. Data ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka masih banyak pada tingkat SMA.

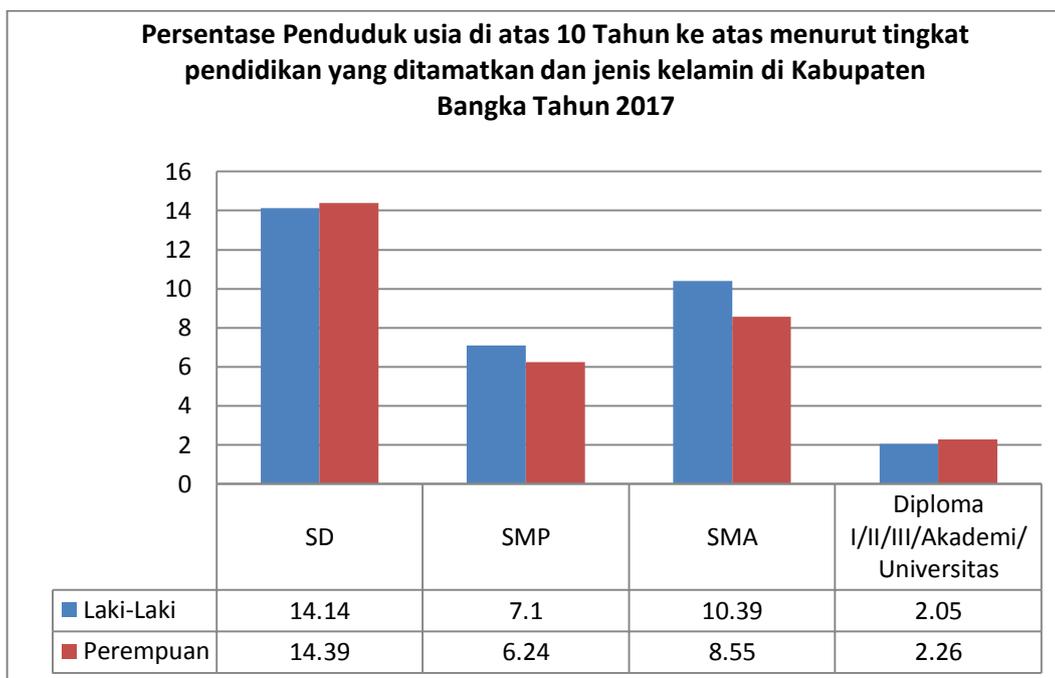
Tabel 5.4
Persentase Penduduk usia di atas 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	43.227	44.189	87.416
SMP	21.898	19.568	41.466
SMA	32.258	26.767	59.025
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	6.882	7.671	14.553
Jumlah	104.265	98.195	317.052

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2018

Secara umum data gender menunjukkan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka jumlah yang menamatkan pendidikannya mulai SD sampai sarjana berimbang, lebih jelasnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Grafik 5
Persentase Penduduk usia di atas 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2017



Pada diagram memperjelas bahwa potensi perempuan menyelesaikan pendidikan lebih tinggi pada tingkat Diploma. Yang cukup besar mencapai 2.26 %. Hal ini ada kaitanya dengan minat perempuan yang cukup besar menjadi guru dengan melanjutkan sekolah pada jenjang Diploma.

BAB VI

KESEHATAN

Salah satu indikator menilai kesejahteraan suatu bangsa adalah derajat kesehatan masyarakatnya. Karena itu perhatian pemerintah terhadap kesehatan terus ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Perhatian tersebut diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah pengadaan dan memanfaatkan kesehatan. Penambahan dan peningkatan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

Isu kesehatan merupakan indikator penting dalam proses pembangunan manusia terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan utama pembangunan Index Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu kesehatan juga termasuk salah satu hak dasar masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Faktor pembangunan kesehatan ini berimplikasi secara langsung kepada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Pada bab ini, selanjutnya akan disajikan serta dipaparkan berbagai data kondisi pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Data yang ditampilkan juga disertai dengan data terpilah gender, sehingga diketahui berbagai permasalahan gender baik kesetaraan maupun ketimpangan yang terjadi dalam akses, peran, kontrol maupun manfaat dalam bidang kesehatan.

Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan terjadinya perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitar untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata sehingga dapat

menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social maupun ekonomis.

Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dengan visi kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu di ketahui ada tidaknya isu gender yang muncul di bidang ini yangakhirnya mengakibatkan kesetaraan gender. Pada bahasan bab ini akan diungkapkan beberapa kondisi ibi, anak dan balita serta sarana penunjang kesehatan. Pada setiap bagian akan diperlihatkan data-data mengenai kondisi dan posisi penduduk baik laki-laki maupaun perempuan dari berbagai sumber yang akan mengungkapkan berbagai isu gender pada bidang kesehatan.

6.1. Saran Prasaran

Sarana prasarana merupakan penunjang untuk tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Bangka. Pada Tabel 6.1 diperlihatkan sarana prasarana yang tersedia.

Tabel 6.1.
Tabel Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2018

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	7
Rumah sakit bersalin swasta	3
Puskesmas	12
Puskesmas Pembantu	35
Puskesmas keliling	17
Posyandu	228
Klinik balai kesehatan	21
Praktek Dokter	121
Praktek bidan	282
Apotik	39
Jumlah	765

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2018

Pada Tabel 6.1 nampak bahwa fasiliats kesehataan yang terbanyak adalah posyandu dan praktek bidan . Banyaknya fasilitas kesehatan ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bangka dan penduduk yang menyebar di 8 kecamatan kota. Karena itu posyandu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan hanya akan berfungsi optimal bila di tunjang oleh petugas kesehatan dan tenaga medis seperti yang ditampilkan pada tabel 6.1.2 berikut:

Tabel 6.2
Banyaknya Tenaga medis kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

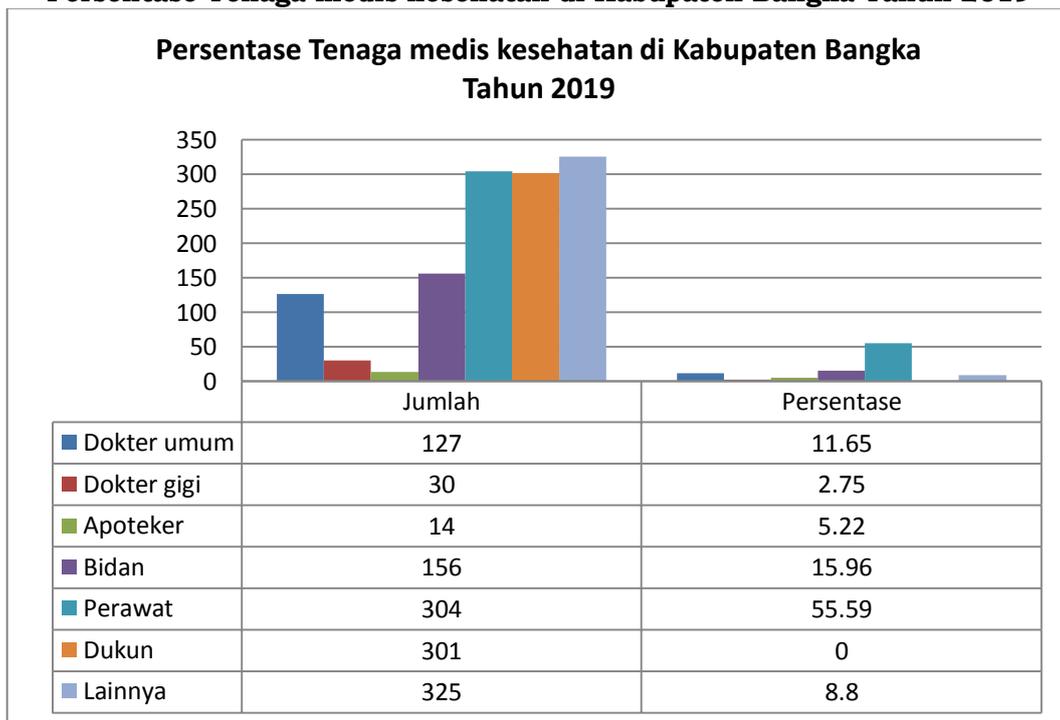
Tenaga Kesehatan Medis	Jumlah	Persentase
Dokter umum	86	6,08

Dokter gigi	21	1,48
Apoteker	49	3,46
Bidan	313	22,12
Perawat	864	61,06
Dukun	0	0
Tenaga Teknisi Kefarmasian Lainnya	82	5.80
Jumlah	1415	

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2018

Pada tabel 6.1.2 belum nampak data gender antara tenaga medis kesehatan laki-laki atau perempuan. Kecuali bidan adalah perempuan. Namun secara umum menunjukkan tidak ada tenaga dukun yang berarti bahwa masyarakat kabupaten Bangka tidak menggunakan tenaga dukun. Gambar berikut menunjukkan persentase tenaga medis di Kabupaten Bangka.

Grafik 6
Persentase Tenaga medis kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019



Pada tabel selanjutnya diperlihatkan komposisi dokter ahli berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 6.3
Banyaknya Dokter Ahli menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Dokter Spesialisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
Penyakit Dalam	5	4	9
Kebidanan Anak	6	1	7
Bedah	1	5	6
Anestesi	7	0	7
	3	1	4
	1	2	3

Radiologi	3	1	4
Syaraf	1	2	3
THT	1	0	1
Kesehatan Jiwa	1	0	1
Kulit Kelamin Mata	0	4	1
Jumlah	29	20	49

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2018

6.2. Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi yang memberikan kekebalan/daya tahan pada tubuh manusia. Sejak ditemukannya teknologi di bidang kesehatan yaitu imunisasi yang diberikan kepada bayi/balita untuk mencegah penyakit yang biasa menyerang anak, telah berdampak pada usia balita, diketahui bahwa anak usia balita sangat rentan terkena berbagai jenis penyakit yang mungkin dapat mengakibatkan kematian. Pemberian imunisasi umumnya dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun pertama sebagai tindakan preventif terhadap masukannya berbagai jenis penyakit ke dalam tubuh. Dikenal berbagai jenis imunisasi untuk bayi dan balita, antara lain BCG, Campak, DPT dan Polio. Pada tabel 6.4 di sajikan data mengenai cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2018.

Tabel 6.4
Jumlah Balita menurut pemberian imunisasi di Kabupaten Bangka 2019

Kecamatan	BCG	Campak	DPT	Polio	Jumlah
Sungailiat	1696	1732	5173	6869	15470
Pemali	508	543	1543	2051	4645
Belinyu	576	629	1793	2369	5367
Riau silip	456	528	1466	1921	4371
Bakam	286	379	1216	1216	3097
Puding Besar	363	338	1016	1378	3095
Merawang	646	668	2003	2649	5966
Mendo Barat	947	930	2752	3699	8328
Jumlah	5.478	5.747	16.962	22.152	50.339

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2018

Pada tabel Nampak bahwa belum dibuat data terpilah dari balita yang diimunisasi. Pentingnya data gender balita adalah untuk mengetahui status dan kondisi balita laki-laki dan perempuan.

6.3. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Angka kematian bayi secara tidak

langsung dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama saat kehamilan dan melahirkan. Data mengenai jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.5. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi di Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Kecamatan	Hidup		Meninggal	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sungailiat	976	952	6	3
2	Pemali	303	288	2	0
3	Belinyu	422	453	1	1
4	Riau silip	254	264	2	1
5	Bakam	163	160	3	1
6	Puding Besar	192	182	2	5
7	Merawang	362	337	1	0
8	Mendo Barat	539	512	3	0
Jumlah		3.211	3.150	20	11

Sumber: Dinkes kab. Bangka Tahun 2018

6.4. Partisipasi Ber KB

Tingkat kesadaran keluarga untuk berpartisipasi ber KB sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk mengajak akseptor muda. Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada aspek social budaya. Ketidak seimbangan antara perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memperlambat proses pembangunan daerah. Karena itu Program Keluarga Berencana (KB) terus digiatkan. Pada Tabel 6.4 menunjukkan alat KB yang paling banyak yang digunakan adalah suntik dan pil masing-masing 42,55 % dan 22,23 %. Selebihnya adalah implant, spiral dan kondom. Kejelasan data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6.6
Jumlah penduduk wanita usia 15-49 Tahun yang berstatus Pernah Kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Alat KB yang sedang digunakan	Jumlah		Presentase
	Pemerintah	Swasta	

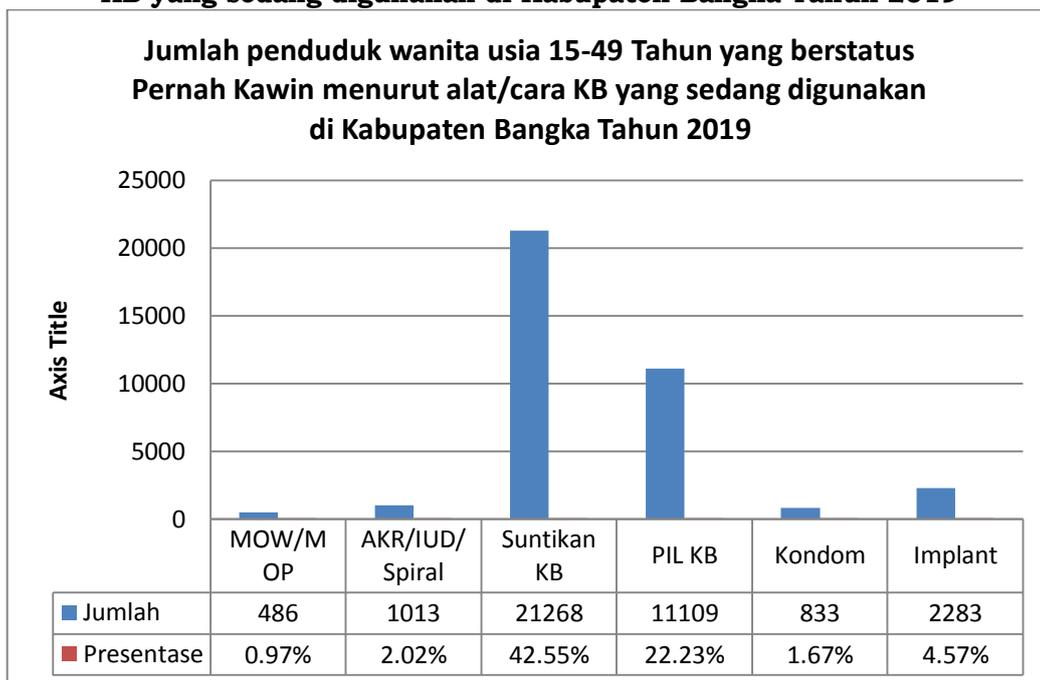
MOW/MOP	335	412	1,47%
AKR/IUD/Spiral	782	431	2,39%
Suntikan KB	2.856	19.104	43,22%
PIL KB	1.762	19.763	22,23%
Kondom	91	1.069	42,36%
Implant	2119	656	5,46%
Jumlah	7.945	41.435	97,18%

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2018 (jumlah PUS : 50.812)

Berdasarkan pendekatan kebutuhan gender, maka partisipasi perempuan yang besar dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan tingkat perumbuhan penduduk masih bias gender. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB. Meskipun diketahui jenis alat dan cara laki-laki hanya menggunakan kondom dan tubektomi yang kurang diminati laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 7

Jumlah penduduk wanita usia 15-49 Tahun yang berstatus Pernah Kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Bangka Tahun 2019



6.5. Lama Pemberian ASI

Salah satu tugas seorang ibu adalah memberikan bayinya ASI, karena kesehatan sebagai modal penting dalam pembangunan SDM, utamanya generasi bangsa yaitu anak (Bayi) yang tidak lepas dari proses tumbuh kembang anak. Salah satu indikator berlangsungnya pertumbuhan anak yang baik apabila pemberian asi eksklusif dilakukan sejak bayi. Karena berdasarkan penelitian diketahui pada air susu ibu terdapat zat pertumbuhan dan antibody yang tak dapat dibuat oleh teknologi apapun. Oleh sebab itu upaya pemberian asi pada anak usia bayi untuk jangka

waktu tertentu sangatlah penting. Pada tabel berikut ditunjukkan jumlah pemberian asi pada usia bayi sampai 1 Tahun.

Tabel 6.7
Jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif
di Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Kecamatan	Pemberian ASI	
		Jumlah (Jiwa)	ASI Eksklusif
1.	Sungailiat	996	662
2.	Pemali	195	137
3.	Belinyu	604	417
4.	Riau Silip	442	352
5.	Bakam	301	220
6.	Puding Besar	351	230
7.	Merawang	525	374
8.	Mendo Barat	933	673
Jumlah		4.347	3.065

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tahun 2018

BAB VII EKONOMI

7.1. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh negara, seperti tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa “tiap warga negar berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang masuk dalam katagori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (Pensiun, cacat dan sebagainya).

Tabel 7.1
Jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Pendidikan Pencari Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tidak Tamat SD	0	0	0
SD	0	0	0
SLTP	1	0	1
SLTA	181	106	287
Diploma I	0	0	0
Diploma II	0	0	0
Diploma III	35	61	96
Diploma IV, SI	103	147	250
S2	0	3	3
S3	0	0	0
Jumlah	320	317	637

Sumber : DINAKERPERINDAG Kab. Bangka Tahun 2018

BAB VIII P U B L I K

8.1. PNS

PNS merupakan abdi negara, yang bertugas melayani masyarakat. Pada tabel 18 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 8.1
Jumlah PNS Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	Total
1.	Golongan I	20	7	27
2.	Golongan II	373	300	673
3.	Golongan III	859	1535	2394
4.	Golongan IV	378	495	873
	Jumlah	1630	2337	3967

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2018

Pada Tabel Nampak sangat potensi PNS perempuan dimana pada Golongan III terdapat 60,35 % dan golongan IV 22,01 %. Namun dalam posisi struktural tidak Nampak perempuan pada pengambil keputusan. Pada berikut diperlihatkan komposisi gender pada jabatan sebagai berikut :

Tabel 8.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2018

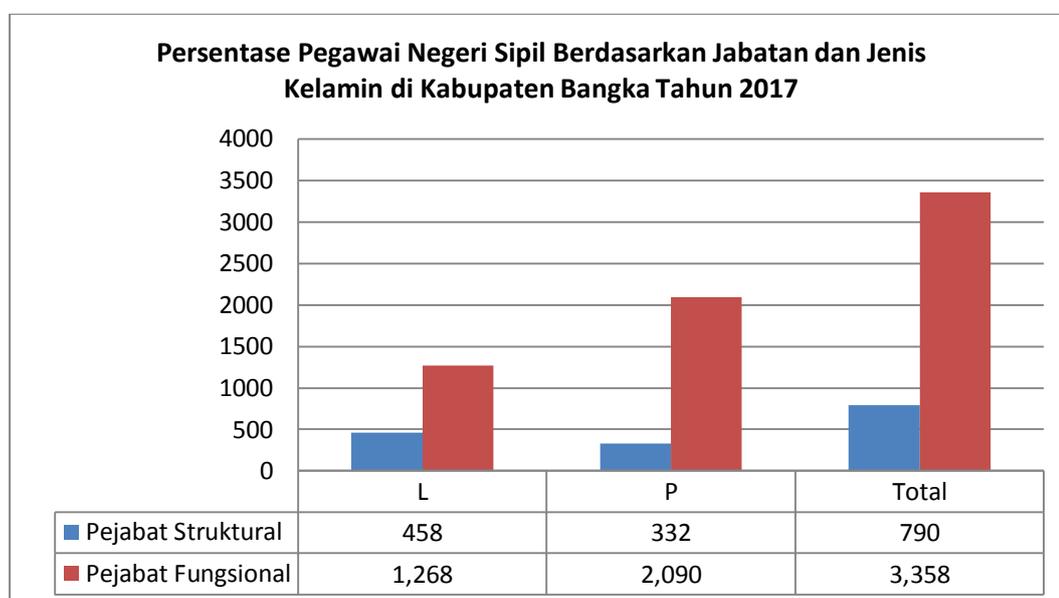
No.	Jabatan	L	P	Total
1.	Pejabat Struktural	420	314	734
2.	Pejabat Fungsional	1.210	2023	3.233

Jumlah	1.630	2.337	3.967
---------------	--------------	--------------	--------------

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2018

Bila Tabel 7.1.1 dibandingkan dengan tabel 7.1, Nampak bahwa perempuan yang banyak di golongan III dan IV tidak memiliki posisi strategis . Hal ini dapat dijadikan isu gender untuk menilai faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan pada kedudukan strategis. Lebih jelas komposisinya diperlihatkan pada diagram berikut :

Grafik 8
Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2017



Tabel 8.3
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Eselon se-Kabupaten Bangka Tahun 2018

No.	Kedudukan	L	P	Total
1.	Fungsional Umum	515	496	1.012
2.	Fungsional Tertentu	695	1527	2222
4.	Eselon II	23	4	27
5.	Eselon III	95	30	125
6.	Eselon IV	294	270	564
7.	Eselon V	7	10	17
Jumlah		1.630	2.337	3.967

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Tahun 2018

8.2. Partisipasi perempuan pada bidang legislatif

Partisipasi perempuan di legislative merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan

strategis. Mengingat pemilihan anggotadewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel partisipasi perempuan di legislative merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggotadewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel berikut ditunjukkan jumlah komposisi gender di DPRD Bangka Tahun 2018. Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa anggota DPRD banyak jenis kelamin laki-laki yaitu 85.71 % sedangkan untuk perempuan hanya 14.28 %.

Tabel 8.4
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Periode 2019
Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin

No	Fraksi	Lk	Pr	Total
1.	Pol. P	7	-	7
2.	Golkar	4	2	6
3.	PPP	3	-	3
4.	Gerindra	1	2	3
5.	Demokrat	6	-	6
6.	Nasdem	3	1	4
7.	Persatuan Amanat Sejahtera	3	-	1
	Jumlah	30	5	35

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2019

8.3. Partisipasi Perempuan di Yudikatif

Sebagaimana di legislatif, maka di bidang yudikatif juga akan dilihat komposisi gendernya. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi gender di TNI dan Polri yang menggambarkan dominasi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang menganggap bidang ini lebih cocok untuk laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang.

Tabel 8.5
Jumlah Personil TNI dan Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2019

Pangkat	L	P	Total
I. Perwira Pertama			
a. Mayor Club	1	-	1
b. Kapten INF	1	-	1
II. Bintara Tinggi			
a. Pembantu Letnan Satu	-	-	-
b. Pembantu Letnan Dua	2	-	2
III. Bintara			
a. Sersan Mayor	3	-	3

b. Sersan Kepala	2	-	2
c. Sersan Satu	1	-	1
d. Sersan Dua	7	-	7
IV. Tantama			
a. Kopral Kepala	1	-	-
b. Kopral Satu	1	-	-
c. Kopral Dua	1	-	-
V. PNS			
a. Gol II B	-	1	1
Jumlah	20	1	21

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2019

8.4. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu aspek hukum yang saat ini mulai diketahui oleh masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan yang dapat terjadi bukan saja diluar rumah tetapi juga dalam rumah tangga. Sehingga saat ini telah ada UU KDRT yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan data DP2KBP3A Tahun 2019 diketahui KDRT yang dilaporkan 9 kasus, dengan penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Dari aspek kriminal tidak ditemukan pelaku perempuan, dan didominasi oleh laki-laki. Bentuk pidana didominasi oleh KDRT. Pada Tabel 7.4 ditunjukkan jumlah Narapidana dan Tahanan di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 403 laki-laki sebagai narapidana dan 25 perempuan. Yang menjadi tahanan dari polisi, lebih jelasnya di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 8.6
Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2019

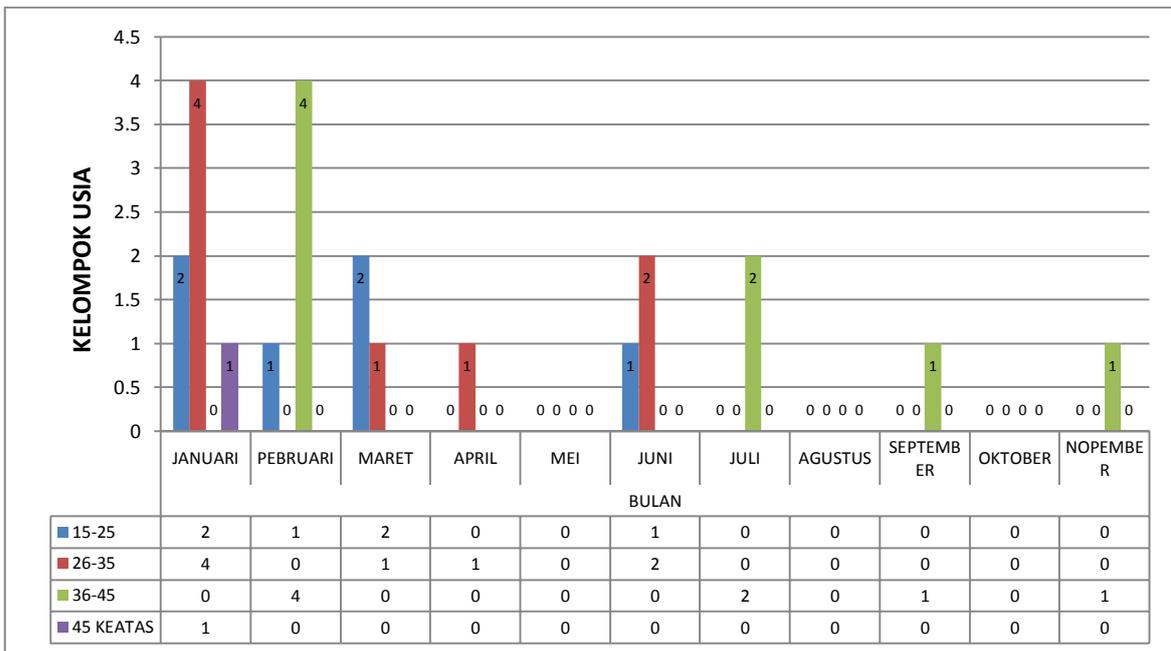
No.	Uraian	L	P	Total
1.	Narapidana	251	17	268
2.	Tahanan	152	8	160
	Jumlah	403	25	428

Sumber : Lapas Kab. Bangka Tahun 2018

Salah satu jenis lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan trafficking terhadap perempuan dan anak adalah Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga lain yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Data jumlah korban yang

mendapatkan pelayanan di Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A di Kabupaten Bangka tahun 2018 menurut kelompok usia dapat dilihat grafik di bawah ini

Grafik 9
Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Usia Kabupaten
Bangka Tahun 2019



BAB IX POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat. Data Profil Gender Kab. Bangka Tahun 2017. Pada Tabel berikut ditunjukkan jumlah komposisi gender pengurus dan anggota fraksi di Kabupaten Bangka.

Tabel 9.1
Komposisi Gender Pengurus dan Anggota Fraksi di Kab. Bangka
pada Tahun 2017

No	Fraksi	Jumlah Anggota		JML
		LK	PR	
1	GOLKAR	41	26	67
2	GERINDRA	36	11	47
3	NASDEM	11	10	21
4	PKS	17	3	20
5	DPK PKPI	6	3	9
6	PPP	41	12	53
7	HANURA	32	12	44
8	PAN	58	12	70
TOTAL		242	89	331

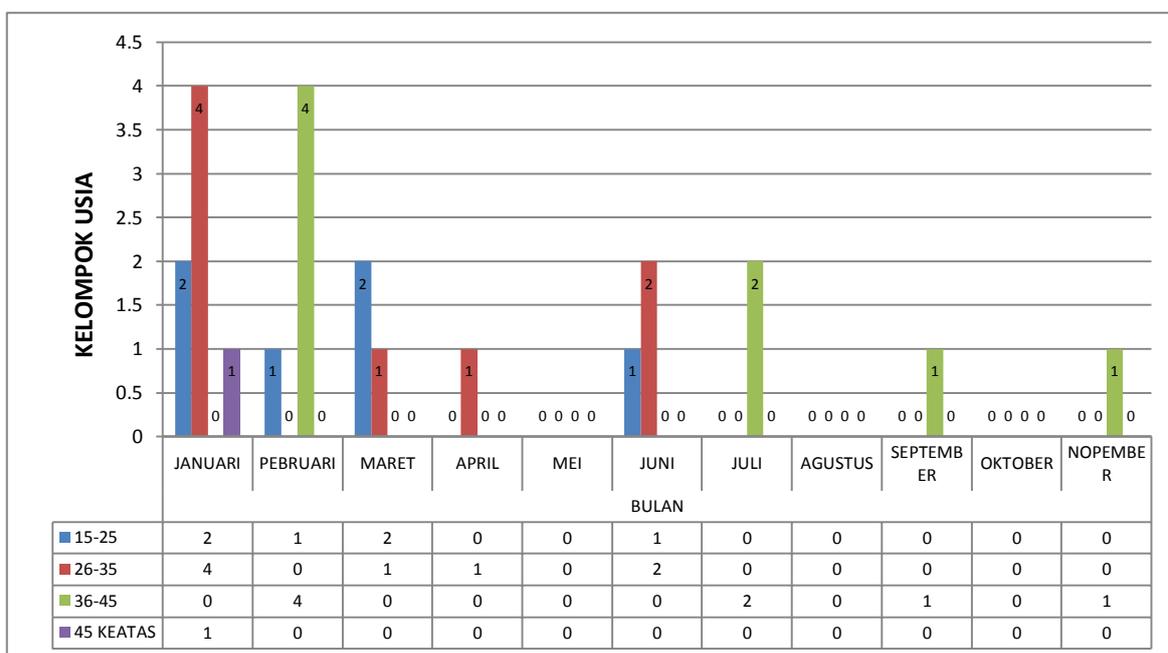
BAB X

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

10.1. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Salah satu jenis lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan trafficking terhadap perempuan dan anak adalah Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga lain yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Data jumlah korban yang mendapatkan pelayanan di Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A di Kabupaten Bangka tahun 2019 menurut kelompok usia dapat dilihat grafik di bawah ini.

Grafik 10
Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Usia Kabupaten Bangka
Tahun 2019



Perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2019

KDRT	UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
0	0

Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat

Jumlah Seluruh Hakim	Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak
14 (empat belas) orang	14 (empat belas) orang

BAB XI

KESIMPULAN

1. KESIMPULAN

- a. Data-data yang tersedia dari berbagai sumber belum banyak yang-dipilah berdasarkan jenis kelamin.
- b. Potensi partisipasi perempuan diberbagai sektor baik sektor-Pemerintah maupun publik menunjukkan masih ada beberapa bidang yang kurang responsif gender.
- c. Pada bidang legislatif perempuan belum mendapatkan porsi yang-seimbang, serta kedudukannya dalam komisi bukan pada posisi strategis atau sebagai pengambil keputusan.
- d. Data masih perlu di rinci berdasarkan jenis kelamin, terutama data di BPS masih banyak yangbelum terpilah.

2. REKOMENDASI

- a. Perlu sosialisasi tentang pentingnya data terpisah berdasarkan gender-(jenis kelamin) kesemua instansi, agar menjadi database dalam penyusunan kebijakan program Kabupaten Bangka.
- b. Perlu Pelatihan Penyusunan Program berbasis gender pada semua-instansi (SKPD), pada pengambil keputusan di Kabupaten Bangka termasuk anggota DPRD. Agar ada kesamaan pandang terhadap pembangunan yang responsif gender.
- c. Penyusunan Statistik Kabupaten Bangka, juga diikuti dengan-penyusunan Profil Gender yang dianggarkan, minimal setiap 1 tahun sekali.

Dari berbagai catatan tersebut terdapat beberapa sebab yang melatar belakangnya diantaranya adalah:

- Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan dan pelaksana program.
- Belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG.
- PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.